

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa pada Strategi Politik dalam Inovasi Pembangunan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merepresentasikan inovasinya dengan diskursus, kekuasaan (wewenang, tekanan/paksaan dan legitimasi) serta pengetahuan. Tujuan dari merepresentasikan inovasi pembangunan melalui simbol-simbol tersebut adalah untuk melihat bagian-bagian dari kekuasaan Kepala Desa terhadap keberhasilan (*Success*) di dalam membangun desa sehingga kesejahteraan dan perekonomian masyarakat meningkat.

Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari beberapa kegiatan dan pembangunan yang telah dicapai, baik itu yang sedang dalam tahap pengerjaan dan bahkan yang sudah selesai dikerjakan. Semua inovasi tersebut di tujukan untuk kepentingan masyarakat semua, diantara yang selesai dikerjakan dan bahkan yang masih dalam proses adalah gudang penyimpanan peralatan desa, parit kecil atau *lubang cacing*, bendungan pengontrol air, jalan perlintasan serta sebuah pasar kecil yang biasa disebut *kalangan* oleh masyarakat Desa Arisan Musi Timur.

Adanya rasa keberhasilan dan pencapaian dalam Strategi Politik inovasi pembangunan desa tersebut kemudian diharapkan akan menjadi acuan untuk pemimpin kelak agar selalu berinovasi membangun desanya dengan

lebih baik. Sebagisalah suatu desa yang dengan katagori maju, Desa Arisan Musi Timur dapat menjadi contoh untuk desa lain terutama dalam melihat Strategi Politik Kepala Desa dalam Inovasi Pembanguna untuk desa.

Sementara Desa Arisan Musi Induk yang merupakan desa induk dari Desa Arisan Musi Timur dapat mencontoh desa yang di mekarkannya supaya dengan harapan desa induk dari Arisan Musi Timur dapat berkembang layaknya Desa Arisan Musi Timur.Semua keberhasilan suatu pembangunan tidak terlepas dari pranana semua pihak baik itu masyarakatnya sendiri dan juga pemerintah itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini, dapat dipahami bahwa untuk mencari seorang pemimpin yang dapat mensejahterakan masyarakatnya serta dapat membangun desanya agar lebih maju lagi dapat di lihat dari pengetahuan yang di miliki serta cara bersosialisasi suatu calon Kepala Desa. Dari bagusnya kepemimpinan seorang dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin, patutnya kita ikut berperan dalam menyukseskan semua inovasi yang di buat Kepala Desa agar kemajuan dapat lebih muda di capai. Dengan adanya anggaran desa yakni APBN sudah sepatutnya penyelenggaraan pemerintah dalam hal ini Kepala Desa dapat memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya, Karna kemajuan suatu desa dapat di lihat dari perekonomian dan kesejahtraan masyarakat di desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Martono, Nanang, (2016). *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: PT RajaGrafindoPersada.

Warjio, Ph.D, (2016). *Politik Pembangunan*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.

Dr. Yusa Djuyandi, S.IP., M.Si., (2019). *Pengantar ilmu politik*, Depok: PT rajagrafindo persada. F2.

Prof. Dr. Damsar, (2010). *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group.

Piotr Sztompka, (2018). *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta; Kencana.

Jurnal:

Mohammad Anwar.(2008).”*Sinergitas Antar Pemangku Kepentingan Dalam Perumusan Rencana Pembangunan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Lamongan - Provinsi Jawa Timur)*” Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makasar

Drs-Johny POL Latufpirrisa qu. (2013).*Optimalisasi Sinergitas Penanganan Konflik Komunal Guna Menciptakan Keamanan Dalam Negeri*.Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA).

Didit Shella N D (2013), “*Konflik Badan Permusyawaratan Desa Dengan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Cangkring Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan Tahun 2001-2006)*“. Skripsi Jurusan Politik Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang

Ulfatul Istiqlaliyah, (2014), *Kerja Sama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, h. 4.

Khairil Anwar (2015), “*Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*” Jurnal Jurusan ilmu hukum Fakultas Ilmu hokum Universitas Mataram.

Munawir Kadir (2016), “*Analisis Yuridis Hubungan Pemerintas Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pa’nakkukang, Kecamatan Pallangga, Gowa)*“. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Randhi Dian Purnama, (2017), *Peran Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Pengawas Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Rannaloe Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa)*, Makassar: UIN Alauddin Makassar, h. 1

Wiwin (2017), “*Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Didesa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba*”.Skripsi jurusan ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makasar.

Achmad Mudatsir, (2017), *Politik Hukum Hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Undang-Undang yang Mengatur Tentang Pemerintahan Desa Pasca Reformasi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, h. 39

Musaddad Shibghatallah, (2017), “*Koordinasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa di Desa Mendik Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser*”, *eJournal Pemerintahan Integratif*, Samarinda: Universitas Mulawarman, h. 160.

Reynold Mubarak (2018), “*Sinergitas Pemerintah Desa Dan Perusahaan Dalam Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Xlv Nusantara (Persero) Didesa Wanua Waru Kec. Libureng Kab. Bone*”.Skripsi Jurusan Filsafat Dan Politik Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.

Muhamad Fadli (2018) *Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Fisik (Studi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum (UPTD PU) Di Kabupaten Penajam Paser Utara)*

Dokumen:

- UU No. 26 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa